BAB I

PENDAHULUAN

Jepang dan Tiongkok merupakan negara di Asia Timur yang memiliki dinamika yang menarik untuk dibahas. Keduanya merupakan kekuatan ekonomi besar dunia dan memiliki sejarah panjang dalam Perang Dunia Ke-2. Hubungan kedua negara juga sering diwarnai oleh isu-isu teritorial yang dapat memicu ketegangan dan beberapa kali mengalami bentrokan di laut dan udara. Meskipun begitu keduanya tidak pernah terlibat dalam perang terbuka pasca Perang Dunia Ke-2.

Kehadiran Amerika Serikat di Asia Timur dan membentuk aliansi pertahanan dengan Jepang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Meski seringkali aliansi pertahanan tersebut menjadi alasan Tiongkok mengambil kebijakan-kebijakan yang cenderung provokatif tetapi di sisi lain Amerika Serikat terbukti menjadi penyeimbang kekuatan yang cukup efektif. Berbagai ketegangan yang terjadi di Asia Timur sering kali mereda berkat kehadiran armada laut dan udara Amerika Serikat.

Dinamika hubungan Jepang-Tiongkok-Amerika Serikat merupakan hal yang sentral dalam konflik-konflik yang mewarnai Asia Timur. Seringkali hal tersebut menimbulkan dilema keamanan. Hubungan yang dekat antara Jepang dengan Amerika Serikat membuat Tiongkok sensitif sehingga menambah kekuatan

militernya. Demikian pula dengan Jepang, karena Tiongkok menambah kekuatan militernya, urgensitas aliansi pertahanan menjadi semakin jelas dan mengakhiri aliansi pertahanan tersebut jelas bukan merupakan sebuah pilihan.

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jepang kehilangan kemampuan dalam bidang militer karena konstitusi Jepang melarang adanya kegiatan untuk mengelola bentuk kekuatan apapun baik itu darat, laut maupun udara. Meskipun konstitusi baru tersebut lebih condong kepada bentuk hukuman Amerika Serikat ke Jepang, tetapi hal tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh Jepang sehingga keputusan apapun yang berkaitan dengan *Self Defence Forces* harus dilakukan melalui proses yang panjang di Diet agar kebijakan tidak menyalahi konstitusi.

Pada 8 September 1951 terbentuklah *Security Treaty between The United States and Japan* bersamaan dengan *Treaty of San Fransisco* sebagai penanda berakhirnya Perang Dunia Ke-2. Akibat dari Perjanjian San Fransisco tersebut Jepang harus membayar kompensasi kepada negara bekas jajahannya, aset-aset luar negeri disita oleh sekutu dan penyerahan beberapa wilayah Jepang kepada Amerika Serikat termasuk di dalamnya Kepulauan Ryukyu. Pada tahun 1972 Kepulauan Ryukyu (Perfektur Okinawa) kembali diserahkan kepada Jepang. Sedangkan *Security Treaty Between the United States and Japan* mengijinkan pasukan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di wilayah Jepang sebagai upaya pencegahan agresi yang ditujukan kepada Jepang. *Security Treaty*

Between the United States and Japan pada kemudian hari digantikan oleh *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960.*

Dasar pembentukan *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960* lebih kepada alasan keamanan. Dunia memasuki era Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat paska Perang Dunia ke-2 berakhir. Tahun-tahun Perang Dingin diisi oleh persaingan antara Komunisme dengan Liberalisme. Persaingan senjata antara dua blok semakin gencar termasuk senjata nuklir. Meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah berperang secara terbuka, tetapi terjadi *proxy war* yang dimotori keduanya seperti yang terjadi di Vietnam. Kedua blok berebut pengaruh dengan menyebarkan ideologi masing-masing. Amerika Serikat bahkan menjalankan politik pembendungan untuk menghalau laju penyebaran komunisme. Merasa rentan dengan komunisme maka terbentuklah traktat kerjasama keamanan.

Hal-hal yang menyebabkan Uni Soviet dianggap sebagai ancaman adalah hubungan antara keduanya merupakan hubungan perang. Jauh sebelum Uni Soviet terbentuk, Kekaisaran Rusia kalah oleh Jepang dalam *Russo-Japanese War* dalam perebutan Manchuria dan Korea. Kemudian dalam *Russian Civil War* Jepang yang saat itu bertindak sebagai anggota Aliansi Pasukan Intervensi menduduki Vladivostok, setengah dari Siberia, Pulau Sakhalin dan Pulau Kuril. Aliansi Pasukan Intervensi mendukung rezim Tsar dan menentang Revolusi Bolshevik (cikal bakal Uni Soviet).

Ambisi Soviet untuk menyebarkan pengaruh di Asia Timur khususnya di Manchuria dan Tiongkok sudah diprediksi oleh Jepang dan invasi Soviet ke Manchuria bukan lagi menjadi sebuah berita yang mengejutkan.[1] Tapi yang mengejutkan bagi Jepang adalah invasi Soviet tersebut terjadi setelah pengeboman di Hiroshima tepatnya 8 Agustus 1945. Soviet menjanjikan pengembalian Pulau Habomai dan Shikotan kepada Jepang sebagai ganti untuk memutuskan aliansi dan tidak menandatangani traktat kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Hal ini tidak berhasil bahkan Jepang memberhentikan duapuluh ribu karyawan yang diduga mendukung komunisme. Praktis dalam keadaan yang rawan serang karena ketiadaan militer paska kalah perang, keberadaan traktat kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat memegang peran yang sentral bagi pertahanan Jepang.

Pada tahun 1980an Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev mencanangkan program *Glasnot* (publisitas), *Perestroika* (restrukturisasi) dan demokratisasi. Akibat dari program-program tersebut terjadi guncangan politik di dalam Uni Soviet yang berujung pada tuntutan negara-negara anggota Uni Soviet untuk merdeka. Pada tanggal 26 Desember 1991 Uni Soviet bubar secara resmi. Pembubaran Uni Soviet menandakan berakhirnya Perang Dingin sekaligus hilangnya ancaman Komunisme di dunia pada umumnya dan di Jepang pada khususnya.

---

[1] Tsuyoshi Hasegawa, "The Atomic Bombs and the Soviet Invasion: What Drove Japan's Decision to Surrender?", *The Asia Pacific Journal: Japan Focus*, http://www.japanfocus.org/-Tsuyoshi-Hasegawa/2501 diakses tanggal 7 Januari 2014

Perang Dingin berakhir tidak serta merta membuat Amerika Serikat hengkang dari wilayah Asia Timur. Keberadaan Korea Utara menjadi ancaman selanjutnya bagi Jepang. Korea Utara sudah sejak lama berambisi untuk mengembangkan senjata nuklir. Tahun 1956 Uni Soviet sudah mulai memperkenalkan tekhnologi nuklir ke Korea Utara. Pada tahun 1991 karena Uni Soviet bubar, maka Korea Utara kehilangan jaminan ekonomi dan program nuklir sempat terhenti ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara Korea Utara dengan Korea Selatan tentang pelarangan senjata nuklir di semenanjung Korea.

Tidak lama berselang tepatnya tahun 1993, Korea Utara mengumumkan penarikan diri dari *Nuclear Nonproliferation Treaty* dan pada tahun yang sama melakukan percobaan misil *Nodong-1* ke arah Laut Jepang. Pada tahun 1998 percobaan misil *Taepodong-1* dalam rangka peluncuran satelit *Kwangmyeongsong-1* dilakukan dan meluncur melintasi wilayah udara Jepang. Sejak saat itu Jepang bersikap waspada dengan menghentikan sementara bantuan ekonomi ke Korea Utara. Terhitung tiga kali Korea Utara melakukan percobaan nuklir yaitu pada tahun 2006, 2009 dan 2013.

Pada tahun 2003 terbentuklah *Six Party Talks* untuk membicarakan program nuklir Korea Utara yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia dan Korea Utara. Dalam rentang tahun 2003 sampai 2009 Korea Utara menunjukkan sikap kerjasama yang fluktuatif. Terkadang kooperatif dengan menyetujui langkah denuklirisasi tetapi disaat yang lain sangat menggebu-gebu dalam progam nuklirnya. Kebanyakan sikap Korea Utara yang kooperatif dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan ketersediaan

energi dari Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Selain tahun 2010 saat serangan Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan, konflik terbuka tidak pernah terjadi antara Korea Utara, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Korea Utara hanya melakukan *bluffing diplomacy* sehingga Korea Utara sebagai ancaman sudah tidak relevan lagi.

Dilihat dari perspektif ekonomi khususnya di wilayah Asia Tenggara, Jepang dikenal sebagai negara *Economic Animal* karena perilakunya yang predatoris dan proteksionis.[2] Hal tersebut dikarenakan fokus Jepang dalam rekonstruksi ekonomi menjadi prioritas utama paska kekalahannya terhadap sekutu pada Perang Dunia Ke-2. Ini tercermin dalam pelaksanaan politik luar negeri Jepang yang dimulai pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Yoshida atau yang lebih dikenal sebagai *Yoshida Doctrine. Yoshida Doctrine* memiliki tiga karakteristik yaitu: (1) pembentukan militer pada level minimum untuk kepentingan pertahanan Jepang, (2) menggantungkan urusan militer kepada Amerika Serikat, dan (3) penekanan pada pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Yoshida adalah Jepang mengalami *economic boom* pada akhir tahun 1950-an kemudian bergabung dengan World Bank dan IMF pada tahun 1952 dan sampai tahun 1980-an Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ditandai dengan

[2] Peng Er Lam, "Japan's Quest for "Soft Power": Attraction and Limitation," *East Asia* (2007) 24:349–363, www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_power.pdf diakses tanggal 25 September 2013

meningkatnya tingkat upah pekerja dan daya beli masyarakat.[3] Yoshida juga mengalirkan bantuan ekonomi kepada negara-negara Asia Tenggara sebagai wujud kompensasi bagi negara-negara bekas jajahan Jepang dan juga sebagai upaya persiapan Asia Tenggara sebagai pasar bagi komoditas ekspor Jepang.[4] Tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh publik Asia Tenggara. Kalangan mahasiswa menuduh Jepang hanya mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara Asia Tengara.[5] Hal ini memicu demo anti-Jepang di Jakarta dan Bangkok saat Perdana Menteri Kakuei Tanaka melakukan kunjungan.

Official Development Assitance (ODA) atau bantuan Ekonomi Jepang yang digunakan untuk membantu perekonomian negara-negara Dunia Ketiga dinilai banyak kalangan khususnya Amerika Serikat sudah tidak tepat sasaran. ODA saat ini menjadi alat politik Jepang untuk mempromosikan perdagangan dan kepentingan investasi Jepang di Asia Pasifik dan tidak sepenuhnya memperhatikan aspek kebutuhan pembangunan negara penerima ODA. [6]

Orientasi ekonomi juga diperlihatkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Takeo Miki dengan mengajukan empat inisiatif kebijakan pertahanan dimana kebijakan kedua berbunyi: pembatasan pada anggaran pertahanan sebesar 1 persen dari GNP. Pembatasan anggaran tersebut dilakukan untuk mencegah pemborosan

---

[3] Takayoshi Kusago, "Japan's Development: What Economic Growth, Human Development and Subjective Well-Being Measures Tell us About?", *Thammasat Economic Journal* Vol.26, No.2, June 2008, www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/188.pdf diakses tanggal 25 September 2013

[4] Bambang Cipto. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika,Realitas,dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h. 183.

[5] *Ibid*. h. 185

[6] Shafiqul Islam, "Foreign Aid and Burdensharing: Is Japan Free Riding to a Coprosperity Sphere in Pacific Asia?" h. 322 www.nber.org/chapters/c7842.pdf diakses tanggal 25 September 2013

dalam sektor pertahanan. Kebijakan ini kemudian membuat Jepang mendapat sebutan *International Free Rider*.[7]

Pembatasan anggaran ini dilindungi oleh *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960* dan juga *peace constitution* Jepang yang memiliki komitmen untuk memegang prinsip non agresi.[8] Dibawah perjanjian ini sebagai ganti akses militer Amerika Serikat di wilayah Jepang, Amerika Serikat setuju untuk menjaga pertahanan Jepang dan memasukkannya ke dalam jangkauan pertahanan nuklir Amerika Serikat.[9]

Pada tahun 1977 Yen menguat terhadap Dollar dan terjadi kenaikan upah pekerja Jepang mendorong Amerika Serikat untuk mendiskusikan kontribusi Jepang yang lebih besar terhadap *United States Forces Japan* (USFJ). Kemudian pada tahun 1978 Jepang menandatangani perjanjian *Labor burden-sharing* yang pertama. Amerika Serikat menilai kontribusi Jepang dapat ditingkatkan menjadi lebih besar lagi. Semenjak itu terjadi banyak penyesuaian beban biaya yang harus ditanggung Jepang melalui *Special Measures Agreement* (SMA). SMA mencakup biaya-biaya perbaikan fasilitas barak tentara dan perumahan, biaya tunjangan-tunjangan, biaya listrik,gas, air bersih dan bahan bakar, biaya pensiun, gaji pegawai, biaya relokasi pangkalan dan lain-lain (lihat lampiran 1).

---

[7] Istilah *International Free Rider* merujuk pada pembatasan anggaran pertahanan Jepang yang hanya 1 persen dari GNP sedangkan Amerika Serikat menghabiskan sekitar 5 sampai 6 persen dari GNP untuk pengeluaran militernya.
[8] *Ibid.* h. 321
[9] Katie Engelhart, "The Battle for Okinawa," *Maclean's*, 18 Maret 2010, http://www2.macleans.ca/2010/03/18/the-battle-for-okinawa/ diakses tanggal 25 September 2013

Sejak itu terjadi peningkatan *burden-sharing* yang cukup signifikan. Dalam rentang tahun 1981 sampai tahun 1987 terjadi peningkatan sampai 7 persen. Pada awal mulanya *burden-sharing* Jepang – Amerika Serikat sebesar 24 banding 76 persen pada tahun 1981 menjadi 31 banding 69 persen pada tahun 1987. Besar biaya yang dikeluarkan Jepang berubah dari $711 juta menjadi $1,68 milyar.[10]

Angka ini kembali meningkat drastis pada tahun-tahun berikutnya. Sampai pada tahun 2001 tercatat *burden-sharing* antara Jepang-Amerika Serikat mencapai $4,6 milyar atau sekitar 75 persen biaya ditanggung oleh pemerintah Jepang.[11] Terjadi trend peningkatan *burden-sharing* terkait USFJ seperti pada tahun 2009 tercatat total biaya sebesar $5,464 milyar, tahun 2010 sebesar $6,668 milyar dan pada tahun 2011 sebesar $7,101 milyar.

Cukup mengherankan di tengah krisis ekonomi global yang terjadi sejak 2008 tidak lantas membuat Jepang serta merta menurunkan pembagian *burden-sharing* terhadap Amerika Serikat. Padahal Jepang merupakan negara yang terkena dampak dari krisis ekonomi global tersebut. Pada tahun 2009 bahkan pertumbuhan ekonomi Jepang negatif.

Tabel berikut menunjukkan biaya yang harus ditanggung oleh Jepang terkait USJF pada tahun 2009 sampai tahun 2012:

---

[10] United States General Accounting Office, *US-Japan Burdensharing: Japan Has Increased Its Contributions but Could Do More*, GAO/NSIAD-89-188 (Washington: August 15, 1989), www.gao.gov/assets/150/148034.pdf diakses tanggal 29 September 2013

[11] Allied Contributions to the Common Defense-2003-Chapter 2 http://www.defense.gov/pubs/allied_contrib2003/Allied2003_Chap_2.html diakses tanggal 5 Oktober 2013

Tabel 1.1 Pembiayaan Jepang untuk *Burden-sharing* dan Tujuan Lain dalam juta dollar AS

	2009	2010	2011	2012
Kenaikan tindakan dasar, dll				
(1) Biaya yang terkait dengan langkah-langkah bagi masyarakat setempat[a]	1,234	1,343	1,485	1,486
(2) Pembagian biaya untuk penempatan USFJ				
(a) SMA				
Biaya Pekerja	1,240	1,299	1,417	1,429
Biaya Keperluan	266	284	312	312
Biaya Relokasi Pelatihan[b]	6	6	5	5
Sub-subtotal untuk SMA	1,512	1,589	1,734	1,746
(b) Perbaikan Fasilitas	234	235	258	258
(c) Tindakan untuk pangkalan personel dll.	313	318	336	337
Subtotal untuk *burden-sharing* penempatan USFJ (a)+(b)+(c)	2,060	2,143	2,328	2,342
(3) Penyewaan fasilitas, biaya kompensasi, dll.[a]	1,406	1,487	1,620	1,713
Jumlah kenaikan langkah-langkah dasar, dll. (1)+(2)+(3)	4,701	4,973	5,434	5,542
Pengeluaran total terkait *Special Action Committee* di Okinawa	119	192	126	108
Jumlah Pasukan AS terkait biaya penyesuaian	644	1503	1541	886
Jumlah total	**5,464**	**6,668**	**7,101**	**6,536**

a Jumlah ditampilkan untuk (1), "biaya yang terkait dengan langkah-langkah bagi masyarakat lokal," dan (3), "fasilitas sewa, biaya kompensasi, dll, "di bawah judul" kenaikan langkah-langkah dasar, dll "
termasuk jumlah yang tidak ditentukan untuk tujuan yang tidak terkait dengan fasilitas AS, namun atas dasar pertimbangan kami (RAND)
b MOFA menganggarkan Y5.1 miliar untuk pengeluaran pada pelatihan relokasi di bawah SMA AS-Jepang, dimana Y1.1 miliar terkait dengan Komite Aksi Khusus di Okinawa dan Y4.0 miliar terkait untuk penataan kembali. Biaya ini muncul untuk dimasukkan dalam total MOD untuk setiap kategori tetapi tidak diidentifikasi sebagai "SMA".

Sumber: RAND National Defense Research Institute *Overseas Basing of U.S Military Forces: An Assesment of Relative Cost and Strategic Benefits* yang diolah dari DepartemenPertahanan Jepang

Tabel 1.2 Pembiayaan Jepang untuk *Burden-sharing* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Lain terkait.

	2012	
	Milyar Yen	Juta U.S. Dollars
Laporan MOFA "Biaya terkait penempatan USFJ"		
(1) Biaya tercakup dalam dokumen anggaran MOD, diberi label sebagai "*Cost Sharing* untuk penempatan USFJ"	186.7	2,342
(2) Biaya tercakup dalam dokumen anggaran MOD sebagai kenaikan dasar, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan lingkungan hidup sekitarnya dan fasilitas sewa	182.2	2,285
(3) Biaya tambahan untuk hal-hal yang tercakup dalam dokumen anggaran MOD		
(a) Perkiraan biaya tanah milik pemerintah yang tersedia untuk digunakan sebagai fasilitas USFJ	165.8	2,080
(a) Pengeluaran ditanggung oleh Kementerian lain (non-MOD) (subsidi dasar, dll)	38.1	478
Subtotal dari biaya tambahan (a)+(b)	203.9	2,558
Total Laporan MOFA "Biaya terkait penempatan USFJ"	**572.8**	**7,185**

Sumber: RAND National Defense Research Institute *Overseas Basing of U.S Military Forces: An Assesment of Relative Cost and Strategic Benefits*

Untuk tahun 2012 bisa dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 terjadi perbedaan total biaya. Pada tabel 1.1 tertulis $6,536 milyar dan pada tabel 1.2 tertulis $7,185 milyar. Perbedaan ini dikarenakan pada tabel 1.1 hanya memuat biaya yang dikeluarkan oleh *Ministry of Defence* (MOD) sedangkan pada tabel 1.2 ditambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kementerian selain MOD.

Jika asumsinya adalah perjanjian ini lebih menguntungkan secara ekonomi bagi Jepang maka keuntungan ekonomi tidak lagi didapat oleh Jepang karena faktanya anggaran *burden-sharing* yang dikeluarkan oleh Jepang membengkak. Kemudian jika dilihat dari pengeluaran militer secara keseluruhan pada tahun 2012 Jepang menjadi negara yang masuk lima besar negara-negara dengan

pengeluaran anggaran militer terbanyak bersama-sama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia dan Inggris.

Burden-sharing USFJ sebesar $7,185 milyar menyumbang 8,25% dari keseluruhan pengeluaran pertahanan Jepang. Jumlah tersebut belum ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk menjaga hubungan baik antara Jepang dengan Amerika Serikat. Sebagai contoh Jepang berpartisipasi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat *War on Terror*. Jepang berpartisipasi pada *War on Terror* melalui ODA. Dalam tujuan pemberian ODA salah satunya adalah mengatasi isu-isu global termasuk di dalamnya terorisme.

Pada tahun 2008 masa pemerintahan Perdana Menteri Fukuda kebijakan memberikan ODA untuk mengatasi *War on Terror* digugat oleh anggota parlemen, Yukihisa Fujita.[12] Fujita mengatakan bahwa harus diadakan investigasi terkait peristiwa 9/11. Semenjak peristiwa 9/11 Jepang memiliki undang-undang Anti Teror yang melegitimasi pemberian dukungan logistik pada pasukan koalisi yang beroperasi di Afghanistan. Pemerintah Jepang menganggap Al-Qaeda bersalah karena Presiden Bush mengatakan seperti itu. Tidak pernah ada investigasi mendalam atau bukti-bukti kongkrit bahwa Al-Qaeda memang bersalah. Kemudian dana anti teror ini berdiri diatas pondasi yang tidak jelas sedangkan ada 24 warga negara Jepang yang meninggal pada peristiwa tersebut.

[12] Benjamin Fulford, "Transcript Of Japanese Parliament's 911 Testimony" http://www.projectcensored.org/24-japan-questions-9-11-and-the-global-war-on-terror/ diakses tanggal 2 November 2013

Christopher W Hughes, seorang profesor politik di Universitas Warwick mengatakan, "*Fukuda's government was under a lot of US pressure to re-deploy ships, and even if he was always somewhat doubtful about the importance of the mission in military terms and the whole US War on Terror, he perceived passing the bill as very important to US-Japan relations.*"[13]

Kemudian muncul berbagai macam perspektif di masyarakat Jepang dalam memandang aliansi Jepang dengan Amerika Serikat. Perspektif tersebut menekankan pada bagaimana sebaiknya Jepang menjalin aliansi dengan Amerika Serikat di masa depan, apakah aliansi tersebut masih penting untuk dilanjutkan ataukah lebih baik Jepang meninggalkan aliansi tersebut. Perspektif-perspektif tersebut adalah Perspektif Globalis, Perspektif Regionalis dan Perspektif Nasionalis.

Perspektif globalis memandang bahwa Jepang harus memainkan peran yang lebih nyata dan substansial dalam konteks global sementara tetap mempertahankan politik luar negeri yang pasif (dalam militer).[14] Perspektif globalis mendukung hubungan yang erat dengan Amerika Serikat tetapi tidak menghendaki adanya pengembangan militer yang melewati batas. Perspektif ini percaya bahwa stabilitas keamanan dunia akan tercapai melalui saling ketergantungan dalam bidang ekonomi sehingga Jepang tidak memerlukan adanya keamanan kolektif dan membatasi perannya dalam keamanan internasional hanya pada ODA dan operasi perdamaian PBB.

---

[13] *Ibid.*

[14] Inoguchi Takashi dan Purnendra Jain, *Japanese Foreign Policy Today* (New York: Palgrave, 2000) h. 180.

Selanjutnya adalah perspektif regionalis. Regionalis memandang bahwa rekonsiliasi politik dan saling ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya akan dapat lebih menjamin keamanan dan kesejahteraan Jepang daripada dengan mempererat kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat.[15] Meskipun begitu regionalis tidak membatasi kerjasama hanya dengan negara-negara Asia melainkan dengan negara-negara Asia Pasifik. Oleh karena itu *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) menjadi instrumen yang penting.

Yang terakhir adalah perspektif nasionalis. Perspektif nasionalis memandang bahwa aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat merupakan hal yang memberatkan.[16] Aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat membuat Jepang harus menanggung biaya burden-sharing yang sangat besar dan mendorong Jepang mengeluarkan anggaran pertahanan yang luar biasa besar pula. Hal ini menimbulkan sentimen anti-Amerika Serikat. Perspektif nasionalis lebih condong pada manajemen pembagian kekuasaan antara negara-negara besar seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan juga termasuk Jepang di dalamnya karena menurut mereka Amerika Serikat sudah bukan menjadi satu-satunya hegemon di dunia.

Adanya perspektif yang berbeda-beda tersebut merupakan indikasi adanya perubahan dukungan terhadap kehadiran Amerika Serikat. Terjadi pro dan kontra di tubuh masyarakat Jepang yang sedikit banyak mempengaruhi kebijakan.

---

[15] *Ibid*. h. 181
[16] *Ibid*. h. 182

Aliansi dengan Amerika Serikat tetap dipertahankan karena dalam beberapa kesempatan Jepang tidak memiliki pilihan kecuali mendukung kebijakan Amerika Serikat seperti dalam kasus Korea Utara. Namun Jepang mulai bereksplorasi menggandeng model kerjasama multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF). Kebijakan yang diambil Jepang merupakan campuran dari perspektif-perspektif di atas.

Selanjutnya, pangkalan militer Okinawa selama ini juga disebut-sebut sebagai pangkalan militer yang menyebabkan masalah sosial dimana terjadi pemerkosaan wanita-wanita Jepang oleh tentara-tentara Amerika Serikat. Skyler Dozierwalker dan Christopher Browning merupakan dua tentara Amerika Serikat yang sedang melakukan kunjungan singkat dan memperkosa seorang perempuan Jepang di Okinawa. Pada tahun 1995 juga terjadi pemerkosaan seorang anak perempuan berusia 12 tahun oleh tiga tentara Amerika Serikat.[17]

Traktat Kerjasama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang tahun 1960 faktanya telah memberatkan Jepang dari segi biaya operasional. Berbagai penyesuaian dilakukan atas tekanan Amerika Serikat di bawah *Special Measures Agreement* dan *burden-sharing* USFJ menunjukkan trend yang terus meningkat baik dari sisi jenis pembiayaan dan besaran nominalnya. Hal tersebut memberikan dampak meningkatnya pula anggaran pertahanan Jepang secara keseluruhan. Traktat ini juga membuat Jepang merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat seperti *War on Terror* dan hal

[17] BBC Indonesia, "Tentara AS Mengakui Pemerkosaan di Okinawa", http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/02/130226_jepang_pemerkosaan.shtml diakses tanggal 2 November 2013

ini memberikan dampak pada semakin tingginya dana yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Keberadaan pangkalan militer di Okinawa sebagai hasil dari Traktat menimbulkan masalah sosial seperti pemerkosaan yang kemudian menimbulkan sentimen anti Amerika Serikat.

Alasan utama disepakatinya Traktat Kerjasama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang tahun 1960 adalah benteng pertahanan menghadapi komunisme. Tetapi kini komunis Uni Soviet runtuh begitu pula dengan sikap Korea Utara yang berulang kali melakukan *bluffing diplomacy* sehingga ancaman keduanya sudah tidak relevan dan juga sudah tidak efisien secara ekonomi. Kini tersisa Tiongkok sebagai negara komunis di Asia Timur. Besar kemungkinan Tiongkok menjadi ancaman berikutnya mengingat dua ancaman sebelumnya merupakan negara komunis.

Konsekuensi ekonomi juga harus ditanggung demi mempertahankan perjanjian ini karena faktanya selain memberatkan anggaran pemerintah, pangkalan militer di Okinawa juga menimbulkan masalah sosial. Pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa sudah kehilangan urgensinya. Sikap Jepang yang tetap mempertahankan perjanjian ini menunjukkan perilaku yang tidak biasa dan jauh dari sekedar keputusan yang bersifat ekonomi semata.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Jepang tetap mempertahankan *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960.*

2. Untuk menggambarkan potensi konflik di Asia Timur khususnya dengan Tiongkok.

C. Rumusan Masalah

"Mengapa Jepang tetap mempertahankan Traktat Kerjasama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1960?"

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih dalam mengenai alasan Jepang dalam keputusannya untuk mempertahankan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa, penelitian ini menggunakan alur pemikiran dengan konsep *deterrence* dan teori *Perfect Deterrence* oleh Frank C. Zagare dan D. Marc Kilgour.

1. Konsep *Deterrence*

Deterence (deterens) dijelaskan oleh Mohtar Mas'oed sebagai upaya untuk mempengaruhi perhitungan-perhitungan dalam pikiran seseorang.[18] Lebih lanjut lagi Mas'oed memberikan ilustrasi bagaimana deterens bekerja. Jika seseorang memilki banyak uang maka ia bisa menjaganya dengan menunggui uang tersebut dengan membawa pedang dan menusuk siapapun yang mendekat. Hal ini disebut sebagai *defense* atau pertahanan. Lain halnya jika orang tersebut tidak menunggui uangnya dan mengancam akan menyiramkan kopi panas bagi siapapun yang mencurinya. Inilah yang disebut deterens. Dalam hal ini orang tersebut tidak membuat pencurian tidak mungkin terjadi karena menyiramkan kopi panas mungkin saja tidak terlalu menyakitkan dan pencurian tetap dapat dilakukan. Apa

[18] Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.*(Jakarta: LP3ES, 1990) h. 163

yang dilakukan adalah mempengaruhi perhitungan-perhitungan dalam pikiran calon pencuri.

Dalam kaitannya dengan mengapa Jepang mempertahankan Traktat Kerjasama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1960 adalah perjanjian ini merupakan upaya Jepang mempengaruhi perhitungan-perhitungan pemikiran negara tetangga, dalam hal ini Tiongkok, sebagai upaya mempertahankan diri. Mengingat secara militer, Jepang memiliki kekuatan yang tidak seimbang dengan Tiongkok sehingga bagaimanapun caranya Jepang harus membuat agar Tiongkok tidak memiliki kesempatan atau tidak mencoba untuk menyerang wilayah Jepang jika sewaktu-waktu terjadi ketegangan politik diantara keduanya. Amerika Serikat diharapkan dapat menjadi penengah antara Jepang dengan Tiongkok.

2. Teori *Perfect Deterrence*

Teori *Perfect Deterrence* dimulai dengan asumsi bahwa deterens akan berhasil apabila kedua belah pihak (dalam konteks ini adalah negara) memiliki kapabilitas ancaman yang kredibel.[19] Kapabilitas yang dimaksud adalah bahwa ancaman yang ada benar-benar berbahaya sedangkan kredibilitas adalah ancaman yang ada benar-benar dipercaya keberadaannya. Kepercayaan berhubungan dengan rasionalitas dalam artian sebuah ancaman dapat dipercaya keberadaannya apabila ancaman tersebut memiliki alasan rasional untuk ditunjukkan.

Kapabilitas merupakan kondisi absolut yang diperlukan agar sebuah deterrence sukses. Kapabilitas memiliki dua dimensi yaitu dimensi fisik dan

[19] Frank C Zagare dan D. Marc Kilgour. *Perfect Deterrence*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) h. 289

dimensi psikis. Aspek fisik berkonsentrasi pada kemampuan untuk menyerang. Ancaman yang tidak mungkin dimanifestasikan kedalam sebuah serangan merupakan ancaman yang tidak efektif. Ancaman yang dapat dihapuskan dengan serangan pencegahan (*preemptive strike*) oleh lawan juga dianggap tidak memiliki kapabilitas. Atau dalam kata lain *second-strike capability* sangat dibutuhkan agar deterens berjalan dengan baik. Aspek psikis berkutat pada taksiran untung-rugi penantang. Apabila penantang memiliki argumen bahwa berkonflik lebih menguntungkan daripada tidak berkonflik, deterens akan selalu gagal.

Dalam Teori *Perfect Deterrence*, kredibilitas ancaman muncul sebagai faktor yang sangat penting bagi penentu kesuksesan deterens. Inti dari kredibilitas terletak pada hal yang paling fundamental dalam keteraturan dunia politik yaitu norma resiprokal.[20] Para ilmuwan empiris menemukan bukti-bukti bahwa dalam waktu-waktu tertentu aktor-aktor politik termasuk negara cenderung merespon satu sama lain dengan strategi *tit-for-tat*.[21] Mengutip catatan Leng dan Wheeler dalam Zagare dan Kilgour "*universality of the norm of reciprocity*" menandakan bahwa bukti-bukti empiris menunjukkan norma ini bertahan lintas waktu, lintas wilayah, lintas sistem, dan lintas budaya.[22] Kerjasama akan direspon dengan kerjasama sedangkan permusuhan akan direspon dengan permusuhan.

Dari sudut pandang Teori *Perfect Deterrence*, sikap resiprokal dianggap sangat natural dan mudah untuk dijelaskan. Membangun sikap resiprokal atau *tit-*

---

[20] Resiprokal dari kata bahasa Inggris *Reciprocity* yang berarti timbal balik atau pembalasan. Norma resiprokal dalam dunia politik berarti adanya norma atau kecenderungan saling balas terhadap setiap pergerakan lawan politik.

[21] *Tit-for-tat* merupakan istilah dalam *Game-Theoretic Models* yang merujuk pada perilaku mengambil langkah yang sama segera setelah lawan mengambil sebuah gerakan.

[22] *Ibid*. h. 296

for-tat dapat menunjang kredibilitas yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan perilaku yang kooperatif satu sama lain. Menurut Huth dalam Zagare dan Kilgour analisis statistik dalam hubungan *extended deterrence*[23] menunjukkan bahwa gaya negosiasi *firm-but-flexible* dan *tit-for-tat* memiliki korelasi yang tinggi dalam kesuksesan *extended deterrence*.[24] Huth mendefinisikan sikap diplomasi *firm-but-flexible* sebagai sinyal yang menandakan bahwa aktor yang dalam posisi bertahan memiliki keingingan untuk berkompromi tetapi tetap tidak ingin menyerah. Sedangkan *tit-for-tat* memberikan respon aktual dalam sebuah krisis atau mobilisasi. Inti dari keduanya dalam merespon provokasi adalah sikap yang resiprokal, sebuah norma yang menandakan kredibilitas ketika dalam situasi yang menjanjikan atau terancam. Sikap resiprokal menunjukkan kredibilitas ketika dipraktekan. Memberikan respon yang serupa dalam keadaan yang ofensif misalnya, menandakan bahwa *defender* memiliki keinginan dan kemampuan untuk melawan sehingga *challanger* akan melihatnya sebagai ancaman yang nyata dan bukan sebagai gertakan semata yang kemudian ancaman *defender* akan dipercayai keberadaannya dan setelahnya *defender* menjadi ancaman yang kredibel.

Status quo juga menjadi salah satu faktor penting deterens meskipun bukan hal yang diperlukan. Status quo memiliki efek yang signifikan untuk mengurangi inisiasi konflik.[25] Akar dari sebuah konflik biasanya adalah ketidakpuasan pada sistem yang ada sehingga ketika hubungan baik dijaga dan mendapatkan respon

---

[23] *Extended Deterrence* adalah tindakan pencegahan sebuah kekuatan bersenjata menyerang negara lain. Jika tindakan pencegahan dilakukan agar kekuatan bersenjata tidak menyerang wilayah sendiri dinamakan *Direct Deterrence*.
[24] *Ibid*. h. 297
[25] *Ibid*.h.293

yang sama (*tit-for-tat*) maka akan meningkatkan saling ketergantungan. Hal tersebut mengakibatkan status quo menjadi sesuatu yang berharga dan dijaga karena biaya untuk menginisiasi konflik menjadi lebih besar daripada insentif yang akan diterima nantinya sehingga bagaimanapun juga pilihan untuk berkonflik diabaikan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu posisi senjata nuklir dalam sebuah deterens. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kapabilitas dan kredibilitas merupakan syarat suksesnya sebuah deterens. Memiliki senjata nuklir meskipun meningkatkan kapabilitas *challanger* tetapi disatu sisi dapat menurunkan kredibilitas *defender*. Oleh karenanya senjata nuklir menjadi faktor *destabilizing* yang membuat deterens menjadi lemah. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana sebuah negara dapat merespon serangan nuklir. Jangan sampai sebuah negara menjadi korban serangan nuklir tetapi tidak memiliki kapasitas untuk membalas. *Second-strike capability* dibutuhkan yang berarti *defender* harus memiliki kekuatan penghancur yang kurang lebih sama, yang tidak lain adalah senjata nuklir juga. Kemudian senjata nuklir jika dimiliki kedua belah pihak akan menjadi alat penyeimbang status quo. Tetapi bagaimanapun juga keputusan untuk memiliki senjata nuklir diikuti oleh adanya kemungkinan deterens macet yang berujung pada kemungkinan terburuk, *all-out war*.

Terkait pada kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat, Teori *Perfect Deterrence* memberikan penjelasan yang masuk akal bagaimana kemudian perjanjian yang secara ekonomi dan urgensitas sudah tidak memadai tetapi tetap

dipertahankan. Asumsi-asumsi yang ada di dalam teori ini dirasa cocok dan relevan terhadap situasi pokok permasalahan.

Dengan tetap mempertahankan perjanjian keamanan tersebut Jepang menjadikan Amerika Serikat sebagai penyeimbang kekuatan. Keberadaan pasukan dan peralatan militer Amerika Serikat secara signifikan menaikan kapabilitas dan kredibilitas pasukan pertahanan Jepang dalam konteks *second-strike capability*. Postur militer Jepang yang defensif merupakan kombinasi yang cocok dengan kemampuan menyerang militer Amerika Serikat sebagai kekuatan militer terbesar di dunia. Perjanjian ini juga membuat Jepang masuk dalam payung nuklir Amerika Serikat sehingga Jepang secara tidak langsung memiliki senjata nuklir. Oleh karena itu status quo dapat dicapai jika berhadapan dengan Tiongkok mengingat Tiongkok merupakan negara yang diakui sah memiliki senjata nuklir. Status quo juga dijaga oleh Jepang melalui ODA. Selama beberapa tahun silam Jepang mengeluarkan biaya yang cukup banyak dalam bentuk ODA kepada Tiongkok dalam upaya untuk membentuk Tiongkok sebagai kekuatan yang bertanggung jawab.[26]

E. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas serta dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai maka penulis dapat mengambil hipotesa bahwa keputusan Jepang mempertahankan *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960* berdasarkan

[26] Masayuki Masuda, "Japan's Changing ODA Policy Towards China", *China Perspective* (May-June 2003), http://chinaperspectives.revues.org/358 diakses tanggal 9 November 2013

pertimbangan Jepang menggunakan Amerika Serikat sebagai alat deterens bagi potensi konflik di Asia Timur khususnya dengan Tiongkok.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tekhnik pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan atau *library research* dengan mengumpulkan, mengamati dan menganalisa data yang berasal dari buku, jurnal penelitian, website, laporan dari instansi terkait, artikel maupun berita-berita yang dimuat dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik. Tekhnik analisis data yang digunakan berupa deskriptif analisis dengan mentafsirkan dan menguraikan secara lengkap dan teratur data-data yang telah diperoleh.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan penelitian yang dilakukan tidak melebar dan kehilangan fokus maka diperlukan adanya jangkauan atau batasan penelitian. Penelitian ini berkonsentrasi hanya pada perjanjian keamanan antara Jepang dengan Amerika Serikat pada tahun 1960 yang berjudul *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960*. Pihak atau negara yang menjadi objek deterens Jepang di Asia Timur adalah Republik Rakyat Tiongkok (PRC) bukan Republik Tiongkok (ROC). Adapun kenyataannya apabila deterens juga dilakukan terhadap Korea Utara atau negara lain di Asia Timur hal tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

H. Sitematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat ditulis secara runtut dan mudah dipahami maka sistematika penulisan dibagi dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan penelitian yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memaparkan dinamika hubungan Jepang-Amerika Serikat dalam konteks *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960.*

BAB III memuat sisi kebangkitan Tiongkok baik secara ekonomi maupun secara militer dan bagaimana persepsi Jepang atas hal tersebut.

BAB IV menjelaskan kekuatan Amerika Serikat di Okinawa, isu-isu pemicu ketegangan hubungan Jepang-Tiongkok, dan bagaimana kebijakan luar negeri Jepang dalam merespon isu-isu tersebut.

BAB V adalah kesimpulan yang didapat dari mulai BAB I sampai BAB V serta ringkasan singkat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB II

DINAMIKA ALIANSI PERTAHANAN JEPANG-AMERIKA SERIKAT

Hubungan aliansi antara Jepang-Amerika Serikat memiliki dinamika tersendiri. Meskipun Jepang dan Amerika Serikat melihat aliansi pertahanan merupakan sesuatu hal yang penting, friksi-friksi yang terjadi sesekali menjadi hambatan dan menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan kerjasama di masa depan. Dimulai dari kawan pada masa Meiji dan Perang Dunia Ke-1, kemudian menjadi lawan pada Perang Dunia Ke-2 dan akhirnya menjalin hubungan aliansi pertahanan pasca Perang Dunia Ke-2 sampai sekarang. Dalam bab ini akan fokus membicarakan dinamika hubungan aliansi keduanya pada masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin.

A. Masa Perang Dingin

Hubungan pada masa Perang Dingin dimulai saat Jepang menyerah kepada sekutu tahun 1945. Sejak itulah Amerika Serikat terus hadir dalam dinamika politik di Asia Timur. Douglas MacArthur sebagai *Supreme Commander for the Allied Power* (SCAP) ketika menduduki Jepang memiliki dua tugas yaitu demiliterisasi dan demokrasi.[27] Aktifitas SCAP berkutat pada pelucutan senjata,

[27] Inoguchi Takashi dan Purnendra Jain, *Japanese Foreign Policy Today* (New York: Palgrave, 2000) h. 137.

rekonstruksi ekonomi, pembubaran *zaibatsu*[28] dan yang terpenting adalah menyusun konstitusi baru Jepang yang sering juga disebut sebagai *Peace Constitution*. Dalam konstitusi baru ini dimasukkan nilai-nilai anti-perang yang menyebutkan bahwa Jepang tidak lagi menggunakan militer- atau dalam konteks ini, perang- sebagai cara untuk mengatasi konflik. Implikasinya postur militer Jepang terbatas pada kemampuan bela diri dan tidak memiliki kemampuan menyerang.

1. Pembentukan *Self Defense Forces*

Militer Jepang disebut *Self Defense Forces* (SDF) atau Pasukan Bela Diri. Anggaran pertahanan Jepang tidak melebihi satu persen dari GNP. Pembentukan SDF sebenarnya kontradiktif terhadap konstitusi karena jelas pada pasal 9 tertulis: "*In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.*"[29] Bagaimanapun juga pembentukan SDF berarti mempersenjatai kembali Jepang setelah sebelumnya dilucuti oleh SCAP. Dengan begitu Jepang kembali memiliki potensi perang. Ironisnya justru SDF dibentuk oleh Douglas MacArthur pada 8 Juli 1950 dengan nama *National Police Reserve*[30] karena tentara pendudukan Jepang dipindahkan ke Korea.

---

[28] Zaibatsu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti kumpulan pebisnis di Jepang yang dipercaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan politik luar negeri Jepang dan sebagai motor utama ketersediaan mesin-mesin perang.

[29] "The Constitution of Japan", http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html diakses tanggal 14 Januari 2014

[30] Inoguchi, *op.cit.*, h. 138

Meskipun disebut bela diri, sebuah kekuatan apakah itu defensif ataukah ofensif sulit untuk dijelaskan karena itu bergantung pada penggunaannya. Sebagai perumpamaan adalah sebuah perisai pada umumnya digunakan untuk melindungi diri, namun ketika perisai itu dilempar dan dapat melukai orang maka perisai tersebut menjadi sebuah senjata. Maka dari itulah terjadi banyak perdebatan di kalangan internal Jepang mengenai interpretasi SDF.

Pemerintahan Yoshida pada tahun 1950-an mengatakan bahwa SDF tidak memiliki kapasitas untuk berperang dalam konteks perang modern.[31] Pengertian ini menempatkan Jepang dalam posisi yang tidak akan mungkin memiliki kemampuan invasi sehingga memperjelas konsep defensif dan pembentukan SDF tidak menyalahi konstitusi. Pengganti Yoshida, Hatoyama Ichiro, yang berkuasa pada tahun 1954 sampai tahun 1956, bahkan mengatakan selain kepemilikan militer tingkat minimum tidak menyalahi konstitusi tetapi juga menganggap bahwa memiliki kemampuan untuk melawan perang modern juga tidak sepenuhnya menyalahi konstitusi. Lain lagi dengan Kishi Nobusuke yang menjabat dari tahun 1957 sampai tahun 1960 ia mengatakan bahwa memiliki senjata nuklir-pun tidak menyalahi konstitusi selama digunakan untuk tujuan bertahan.

2. Nuklir Menjadi Penanda Awal Perang Dingin

Pada tahun 1946 sudah mulai terlihat perubahan pada politik internasional ditandai dengan banyaknya fokus akademisi pada senjata nuklir mengenai

[31] *Ibid.* h. 137

dampak dan kemungkinan memiliki senjata nuklir sebagai upaya deterens. Beberapa pemimpin Jepang seperti Ashida sadar akan hal tersebut.[32] Pada tahun 1947 Jepang menyarankan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan basis militernya di Jepang sampai nanti setelah disepakatinya perjanjian damai yang mengakhiri pendudukan dan sebagai gantinya Amerika Serikat menjamin keamanan Jepang jika sewaktu-waktu terjadi situasi gawat darurat. Kemudian pada tahun 1949 Uni Soviet melakukan tes pertama senjata nuklirnya di padang rumput Kazakhtan dan sukses, menandai berakhirnya monopoli Amerika Serikat terhadap senjata nuklir. Pada tahun yang sama Komunis Tiongkok menang atas Tiongkok Nasionalis dan pada tahun 1950 Perang Korea pecah.

Kemampuan Soviet dalam mengembangkan senjata nuklir, kemenangan Komunis Tiongkok, dan pecahnya Perang Korea karena perbedaan ideologi komunis yang dianut Korea Utara membuat Asia Timur praktis dalam kepungan Komunisme. Posisi basis militer Amerika Serikat terbukti menjadi vital bagi Jepang. Amerika Serikat juga sadar akan hal ini bagaimana pentingnya basis militer di Jepang dan memang benar bahwa pada kemudian hari basis militer ini menjadi fokus dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat di Asia Timur. Terjadilah simbiosis mutualisme.

---

[32] *Ibid*. h. 139

3. Awal Mula Aliansi Pertahanan Jepang-Amerika Serikat

Pada tahun 1951 tercapai *San Fransisco Treaty* menandai berakhirnya pendudukan tentara sekutu terhadap Jepang dan bersamaan dengan itu tercapai pula kesepakatan *Security Treaty between The United States and Japan* yang menjadi dasar hukum keberadaan militer Amerika Serikat di wilayah Jepang sebagai penjamin keamanan dari serangan eksternal. Semenjak itu kebijakan pertahanan Jepang bergantung kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini kemudian direvisi dan ditandatangi perjanjian baru *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan* pada tanggal 19 Januari 1960 di Washington DC.

Bersama dengan jalannya waktu, ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat berubah dari sekedar menangkal serangan eksternal menjadi alat deterens. Hal ini terungkap dalam prinsip kebijakan pertahanan pertama *Basic Policy for National Defense* yaitu *"to deal with the external aggression on the basis of the Japan-U.S. security agreements . . . in deterring and repelling such aggression."* Selama Jepang dapat bergantung kepada militer Amerika Serikat terhadap ancaman eksternal maka SDF Jepang dapat fokus terhadap ancaman internal.

Seperti halnya SDF pembentukan aliansi pertahanan ini mengalami dilema interpretasi konstitusional. Apakah aliansi yang terbentuk sesuai dengan konstitusi atau tidak. Dalam pasal 5 perjanjian keamanan tertulis

> *"Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the*